

Pembantu Rumah Tangga Diperintah Mengakhiri Penyalahgunaan terhadap Para Pekerja Domestik di Singapura

Ringkasan

Aku tidak diijinkan untuk pergi ke luar. Aku tidak pernah pergi ke luar, bahkan untuk membuang sampah sekalipun. Aku selalu di dalam, aku bahkan tidak pergi ke pasar. “Aku merasa seperti berada di dalam penjara. Itu sungguh-sungguh hukuman penjara. Aku juga tidak diijinkan untuk memutar radio.... Aku banya bisa melihat dunia luar ketika aku menjemur pakaian.”

— Sri Mulyani (bukan nama sebenarnya), pekerja domestik Indonesia, umur 33 tahun, Singapura, 19 Februari 2005

Aku takut, jika aku melarikan diri, aku akan ditangkap polisi. Nyonya rumah sering marah kepadaku, komplain ke agen, dan agen juga marah kepadaku. [Agen bertanya] “Apa yang kamu inginkan?” Aku menjawab, “Aku ingin mati, Bu, sebab orang-orang di sini kejam, semua yang aku lakukan salah, Aku selalu dibilang bodoh dan dungu.”

[Sungguh malang.] Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus Aku lakukan, maka Aku minum racun tikus dan kecoak. Aku bilang kesadaran, dan Nyonya rumah membawaku ke rumah sakit....

Polisi bilang kepadaku bahwa mencoba untuk bunuh diri adalah salah. Ketika peristiwa itu terjadi, Aku tengah bekerja persisnya tujuh bulan. Aku telah berpendapatan S\$90 [U.S.\$53].

— Muriyani Suharti (bukan nama sebenarnya), pekerja domestik, umur 22 tahun, Singapura, 8 Maret 2005

Antara 1999 dan 2005, sedikitnya 147 pekerja domestik migran meninggal akibat kecelakaan kerja atau bunuh diri, kebanyakan dengan cara melompat atau jatuh dari bangunan tempat tinggal. Tidak ada alasan tunggal mengapa para pekerja domestik mengambil keputusan untuk bunuh diri, tetapi riset yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas Hak Asasi Manusia (*Human Rights Watch*) menunjukkan bahwa banyak wanita dibuat putus asa oleh kondisi kerja yang buruk, kegelisahan atas besarnya hutang ke agen pengerah tenaga kerja, isolasi sosial, dan pembatasan di dalam rumah secara berkelanjutan, yang kadang-kadang hingga berminggu-minggu.

Sebagaimana telah diakui oleh pihak yang berwenang, banyak dari kematian disebabkan oleh kecelakaan kerja. Beberapa pekerja meninggal setelah majikan mereka memaksa mereka untuk mengadu jiwa, meski banyak cerita tentang itu, seperti membersihkan jendela dari luar atau menjemur pakaian pada tiang bambu yang digantung di ambang jendela.

Sementara kematian para pekerja migran yang diuraikan di atas telah mendapat perhatian yang besar oleh media dan penentu kebijakan, konteks di mana kematian itu terjadi begitu sering dilewatkan. Laporan ini, yang didasarkan pada riset yang luas dan pada lebih dari seratus wawancara, mensurvei kondisi-kondisi yang mengandung unsur penyalahgunaan yang dihadapi oleh banyak pekerja domestik di Singapura saat ini.

Banyak pekerja domestik migran di Singapura menghadapi jam kerja yang panjang tak karuan, tidak adanya libur mingguan, dan gaji rendah, suatu rangkaian permasalahan yang dikesampingkan oleh hukum Singapura dan disinggung semata melalui paket informasi yang tidak mengikat secara hukum. Dalam banyak kasus, para pekerja domestik migran di Singapura bekerja tigabelas sampai sembilan belas jam sehari, tujuh hari per minggu, dan terkurung di tempat kerja. Mereka mendapat kurang dari separuh upah pekerja seprofesi di Singapura—seperti tukang kebun dan kebersihan—dan dipaksa melepaskan upah empat sampai sepuluh bulan pertama untuk membayar kembali biaya agen pengerah tenaga kerja. Dalam kasus yang paling buruk, dengan dipecundangi oleh agen atau majikan atau kedua-duanya, para pekerja domestik migran menderita di bawah kondisi-kondisi yang mendorong terjadinya kerja paksa.

Para pejabat Singapura kini mulai memberikan perhatian serius terhadap permasalahan ini. Pihak yang berwenang telah menerapkan hukuman yang keras pada majikan yang secara fisik menyakiti atau tidak mau membayar upah pekerja domestiknya. Walaupun semakin banyak jumlah pejabat yang memberikan perhatian mereka ke para pekerja domestik, permasalahan itu tetap berlangsung. Dan sekalipun ketentuan hukum dan peraturan yang diterapkan di Singapura menawarkan perlindungan lebih kuat dibanding di negeri tetangga lainnya seperti Malaysia, Singapura masih jauh di belakang Hong Kong, yang menyertakan persoalan pekerja domestik ke dalam hukum ketenagakerjaan utamanya, melindungi hak-hak mereka untuk libur mingguan, upah minimum, cuti melahirkan, dan liburan umum. Majikan di Hong Kong juga harus menanggung biaya rekrutmen dan penempatan, seperti ongkos visa, asuransi, tes kesehatan yang dipersyaratkan, dan transportasi perjalanan pulang pergi dari kota kediaman pekerja.

Pemerintah Singapura sampai saat ini lebih suka untuk bersandar pada kekuatan pasar dibanding pada hukum untuk mengatur isu pekerja domestic, seperti biaya yang dikenakan oleh agen pengerah tenaga kerja, upah, dan hari libur mingguan. Akibatnya, nasib pekerja domestik migran di Singapura sangat beragam. Seorang pekerja bisa jadi merasa nyaman dengan majikan dan agen pengerah tenaga kerja yang baik, menikmati kondisi kerja yang bagus, dan mendapat upah yang bisa dia tabung atau secara reguler dia kirim ke rumah asalnya. Atau seorang pekerja bisa jadi bekerja berbulan-bulan tanpa upah untuk mengatasi hutang yang berasal dari biaya rekrutmen yang tidak kaprah, bekerja berjam-jam lamanya sepanjang tujuh hari per minggu, dan menghadapi larangan meninggalkan tempat kerja. Pihak berwenang Singapura harus mengambil langkah lebih ekstra lagi—melalui pembaruan hukum perundang-undangan, kampanye kesadaran publik yang tinggi, dan penegakan hukum yang lebih konsisten—untuk memastikan semua pekerja dilindungi dari berbagai penyalahgunaan dan segera bisa mengupayakan ganti-rugi bila dianggap perlu.

* * *

Singapura, suatu negara-kota nan makmur di Asia Tenggara, menarik perhatian para pekerja domestik migran perempuan di sekitar kawasan itu. Kira-kira 150.000 perempuan, terutama dari Indonesia, Filipina, dan Sri Lanka, memegang surat ijin bekerja untuk dua tahun ketenagakerjaan Singapura. Kira-kira satu dari setiap tujuh rumah tangga Singapura

mempekerjakan satu pekerja domestik migran yang “tinggal di dalam (*live-in*)”. Pemeliharaan anak, tugas-tugas domestik, dan pemeliharaan orang usia lanjut yang dilakukan oleh pekerja-pekerja perempuan ini membantu memungkinkan para lelaki dan perempuan Singapura untuk bekerja di luar rumah mereka. Pemerintah Singapura juga memandang dipekerjakannya para pekerja domestik asing sebagai strategi untuk menaikkan angka kelahiran—pelayanan domestik meringankan beban para wanita karir dan keluarga-keluarga Singapura yang memutuskan untuk membesarkan anak-anak.

Tidak ada data yang secara akurat menunjukkan jumlah pekerja domestik migran perempuan yang terlibat melawan hak-hak tenaga kerja dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Banyak pekerja domestik migran mempunyai pengalaman positif. *Human Rights Watch* mewawancarai para pekerja domestik yang telah menerima upah dan libur secara teratur, menikmati tempat tinggal yang layak, dan mengembangkan ikatan pribadi yang erat dengan para majikan mereka. Kementerian Tenaga Kerja memperkirakan bahwa satu dari tiga pekerja domestik memperbarui kontrak dua tahunnya dan melanjutkan untuk bekerja pada majikan yang sama.

Cukup banyak pekerja domestik migran yang tidak begitu beruntung. Terisolasinya mereka di rumah-rumah pribadi membuat sukar untuk memastikan jumlah persis para pekerja domestik migran yang mengalami penyalahgunaan. Namun demikian, para pekerja domestik telah membuat ribuan komplain kepada kedutaan mereka, agen-agen pengerahan tenaga kerja, organisasi-organisasi layanan sosial, Polisi Singapura, dan Kementerian Tenaga Kerja setiap tahun. Kedutaan Indonesia sendiri memperkirakan telah menerima lima puluh keluhan per hari, kebanyakan berasal dari para pekerja domestik. Kedutaan Filipina dan Sri Lanka memperkirakan menerima antara empat puluh sampai delapan puluh keluhan dari para pekerja domestik per bulan. Banyak penyalahgunaan mungkin tidak pernah dilaporkan, terutama jika majikan memulangkan seorang pekerja domestik sebelum dia mempunyai suatu kesempatan untuk mencari bantuan.

Penyalahgunaan kerap bermula sejak di negara asal pekerja domestik. Praktek rekrutmen dan perundang-undangan sangat beragam di masing-masing negara. Filipina telah secara jelas membuat kebijakan menyangkut kontrak ketenagakerjaan dan biaya rekrutmen yang standard. Kontrak ketenagakerjaan menyebutkan adanya satu hari libur setiap minggu dan upah minimum bulanan sebesar S\$350 [U.S.\$206]. Tetapi, banyak orang Filipina datang lewat agen tak berizin (*unlicensed agents*) atau dengan visa turis, yang membuat mereka terkena biaya mahal, menghadapi kondisi kerja yang buruk, dan memiliki akses yang terbatas untuk mengurus ganti-rugi. Di Indonesia, para pekerja domestik menghadapi penarikan biaya tinggi oleh agen tenaga kerja lokal, dan sering terkurung di fasilitas pelatihan yang terkunci dan sesak selama hingga enam bulan masa penantian mereka untuk ditempatkan ke luar negeri. Banyak pekerja domestik melaporkan makanan yang tidak cukup dan mengalami beberapa kekerasan fisik.

Beragam rute perjalanan yang dilewati para pekerja untuk sampai ke Singapura berkorelasi dengan kondisi yang mungkin mereka hadapi saat kedatangan. Menurut pejabat kedutaan dan penelitian *Human Rights Watch*, para pekerja yang berangkat lewat agen tak berizin sangat mungkin mendapatkan gaji rendah, tidak memiliki hari libur, dan pemekerjaan ilegal ke berbagai rumah. Beberapa pekerja domestik dari Indonesia, sebagai contoh, menceritakan kepada kami bahwa mereka terancam pembalasan oleh agen pengerah tenaga kerja yang akan menyelundupkan mereka ke dalam pelacuran atau menyebabkan mereka harus membayar denda substansial jika mereka tidak menyelesaikan pembayaran hutang mereka. Para pekerja domestik lainnya melaporkan bahwa agen-agen pengerah tenaga kerja menyita paspor mereka dan informasi kontak apa saja yang mereka miliki, yang membuat mereka sulit untuk mencari bantuan.

Di Singapura, pemerintah tidak cukup mengatur pembiayaan, “pinjaman pribadi,” dan pengaturan pengurangan gaji yang dikenakan oleh agen penerah tenaga kerja terhadap para pekerja domestik migran. Persaingan yang keras di antara lebih dari enam ratus agen penerah tenaga kerja telah menyebabkan mereka mengurangi biaya yang dibebankan ke majikan, dan mengalihkan biaya rekrutmen, transportasi, pelatihan, dan penempatan kepada para pekerja domestik. Para pekerja domestik yang berganti majikan membayar biaya ekstra untuk ongkos perpindahan, yang kadang-kadang menambah beban hutang mereka berbulan-bulan. Dengan mencari penempatan kerja di Singapura menyusul usaha mereka untuk lepas dari kemiskinan di negara mereka sendiri, banyak wanita harus memiliki hutang besar yang bisa mereka atasi dengan bekerja selama empat sampai sepuluh bulan dengan upah kecil atau tidak sama sekali.

Undang-Undang Agen Penerahan Tenaga Kerja menetapkan bahwa agen penerah tenaga kerja tidak bisa menuntut biaya kepada pencari kerja lebih dari 10 persen dari pendapatan bulan pertamanya. Kementerian Tenaga Kerja Singapura berargumentasi bahwa tuntutan biaya terhadap para pekerja domestik bukanlah biaya agen, melainkan pinjaman pribadi yang berada di luar parameter hukum. Perbedaan atas biaya yang berhubungan dengan rekrutmen, pengolahan, dan penempatan dengan majikan adalah suka-suka (sewenang-wenang) dan secara tidak adil melepaskan para pekerja domestik migran dari perlindungan yang penting. *Human Rights Watch* mewawancarai para pekerja domestik yang bilang bahwa mereka tinggal di dalam situasi menyakitkan akibat kewajiban membayar hutang mereka.

Pemerintah Singapura telah menelorkan beberapa kebijakan yang memperburuk pengisolasian para pekerja domestik di dalam rumah dan resiko penyalahgunaan atas mereka. Persoalan pertama adalah uang jaminan keamanan (*security bond*) sebesar S\$5,000 [U.S.\$2,950] yang dibebankan kepada majikan yang mempekerjakan pekerja domestik. Majikan kehilangan uang jaminan itu jika pekerja domestik mereka melarikan diri atau jika mereka tidak membayar biaya repatriasi pekerja domestik. Pemerintah Singapura menetapkan kebijakan ini dalam usaha untuk mengendalikan imigrasi ilegal dan untuk memastikan majikan mempunyai dana cukup untuk memulangkan pekerjaanya pada saat selesainya kontrak mereka. Alih-alih, uang jaminan itu telah menjadi suatu perangsang bagi majikan untuk secara ketat membatasi pergerakan para pekerja domestiknya, mencegah majikan untuk tidak memberi kepada para pekerja hari libur mingguan dan kadang-kadang untuk mengunci pekerja di dalam tempat kerja. Kebijakan lain mengikat izin pekerja domestik migran kepada keluarga tertentu, yang memberi majikan kuasa tak terhingga. Dengan sistem yang ada ini, majikan bisa memulangkan pekerja domestik sesuka hati, sekalipun mereka belum melunasi hutang mereka atau menerima pendapatan berapapun.

Aturan izin kerja Singapura melarang pekerja domestik migran untuk hamil, membatasi perkawinan dan hak-hak reproduktif mereka, dan menyediakan perangsang lebih lanjut bagi majikan untuk mengurung pekerja domestiknya pada tempat kerja agar tidak “melarikan diri” atau “berpacaran.” Larangan hamil juga mendorong akses yang tidak sama kepada layanan perawatan kesehatan, termasuk aborsi secara sukarela, sebagaimana yang menjadi kepercayaan beberapa majikan, agen, dan pekerja domestik bahwa upaya melakukan aborsi akan mengakibatkan deportasi secara otomatis.

Singapura, dalam usahanya untuk mengatur migrasi tenaga kerja tak mahir, juga memberlakukan pajak bulanan pada majikan pemegang izin kerja—majikan pekerja domestik harus membayar S\$200-295 [U.S.\$118-174] kepada kas pemerintah pusat setiap bulan. Jumlah ini lebih besar upah yang diberikan majikan kepada pekerja domestik itu sendiri. Dengan 150.000 pekerja, pajak dimaksud sepadan dengan angka S\$360-531 juta (U.S.\$212-313 juta) setiap tahun. Tidak satupun dari dana dimaksud diperuntukkan bagi layanan untuk

pekerja migran.

Sebagai respon terhadap meningkatnya publisitas dan pengawasan atas penyalahgunaan terhadap pekerja domestik, dua tahun lalu Kementerian Tenaga Kerja Singapura telah melakukan beberapa pembaruan. Ini meliputi program orientasi wajib untuk karyawan dan majikan baru, komitmen yang tinggi untuk membawa kasus penyalahgunaan fisik dan gaji tak terbayar ke pengadilan, serta pengenalan program akreditasi bagi agen-agen penerah tenaga kerja. Kementerian ini juga telah menerbitkan suatu panduan informasi yang membimbing majikan untuk memberikan perlakuan yang layak terhadap pekerja domestik dan memberi tahu mereka tentang hukuman bagi serangan fisik dan pembatasan yang dipaksakan.

Prakarsa ini, meskipun penting, tidaklah cukup. Singapura harus melakukan upaya lebih untuk menyelesaikan problem ketidaksetaraan dan ketiadaan perlindungan yang mengakibatkan meluasnya penyalahgunaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Kompensasi Tenaga Kerja Singapura seharusnya diamandemen untuk meliputi pekerja domestik. Perundang-undangan ini menjamin adanya libur mingguan, pembatasan atas jam kerja, dan pembayaran lembur dan gaji reguler. Perundang-undangan tersebut juga mengatur pengurangan gaji untuk pembayaran hutang dan ganti-rugi atas kecelakaan kerja. Singapura seharusnya juga menyelenggarakan mekanisme yang lebih kuat untuk memeriksa tempat kerja dan agen-agen penerahan tenaga kerja. Program Akreditasi, meskipun merupakan suatu langkah positif, membutuhkan perlindungan yang baik pada hak-hak pekerja domestik, termasuk transparansi yang tinggi tentang rekrutmen dan tuntutan biaya penempatan, serta ketentuan-ketentuan terinci mengenai kondisi kerja, seperti libur mingguan.

Di suatu negeri yang terkenal keras dalam menegakkan hukum demi penciptaan ketertiban dan efisiensi, kegagalan untuk menyediakan perlindungan yang sama dan cukup kepada seluruh kelas pekerja adalah suatu anomali (keganjilan) dan mengerdilkan aturan hukum.

Bekerjasama dengan negara-negara pengirim tenaga kerja dan lembaga-lembaga internasional seperti Organisasi Tenaga Kerja internasional (*International Labor Organization*), Singapura seharusnya melakukan pembaruan yang efektif dan segera untuk mengakhiri berbagai penyalahgunaan ini. Singapura mempunyai sebuah pilihan. Ia dapat menjadi suatu model standard (*standard-setter*) di kawasan ini bagi negara-negara penerima tenaga kerja. Atau ia dapat bersedia menerima solusi terbaik nomor dua yang gagal untuk menunjuk akar penyalahgunaan terhadap pekerja domestik migran.

Laporan ini didasarkan pada riset selama beberapa bulan yang mencakup riset lapangan di Singapura pada bulan Februari, Maret, dan November 2005. *Human Rights Watch* menyelenggarakan 65 wawancara mendalam dengan para pekerja domestik migran, meninjau ulang file-file kasus 25 pekerja domestik migran, dan mengadakan kelompok fokus (*focus groups*) dan wawancara informal dengan lusinan lainnya. Wawancara-wawancara ini mengambil tempat pada tempat perlindungan dan program-program pelatihan keterampilan; di taman, pusat belanja, dan tempat ibadat pada saat hari libur pekerja domestik; dan di agen-agen penerahan tenaga kerja. Kita juga mewawancarai lebih dari lima puluh wakil dari Kementerian Tenaga Kerja Singapura, agen penerah tenaga kerja, majikan, dan organisasi-organisasi swasta berbasis keagamaan dan LSM. Semua nama pekerja domestik yang dikutip di laporan ini telah diubah untuk melindungi identitas mereka. Banyak agen penerah tenaga kerja dan penyedia jasa layanan juga berbicara dengan kami menyangkut kondisi keganjilan, dan nama-nama mereka juga telah pula disamarkan.

Ini adalah laporan *Human Rights Watch* ke sembilan tentang penyalahgunaan terhadap pekerja domestik, termasuk anak-anak maupun orang dewasa. Kita juga telah mendokumentasikan penyalahgunaan di El Salvador, Guatemala, Indonesia, Kuwait, Malaysia, Saudi Arabia, Togo,

dan Amerika Serikat.

Rekomendasi Utama

Human Rights Watch Menghimbau pemerintah Singapura untuk:

Menyediakan perlindungan hukum yang menyeluruh dan sama kepada pekerja domestik migran dengan cara:

- Mengamandemen Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kompensasi Pekerja guna menyediakan perlindungan yang sama kepada para pekerja domestik.
- Menyelenggarakan dan meninjau ulang secara periodik upah minimum nasional untuk menyelesaikan kerentanan pekerja domestik terhadap praktik eksploitasi upah. Dewan Upah Nasional (*National Wages Council*) seharusnya juga menyelidiki dan merekomendasikan berbagai kebijakan yang mempromosikan upah yang sama untuk pekerjaan serupa di sektor pekerjaan domestik.
- Menciptakan suatu kontrak standard yang melindungi hak-hak pekerja domestik migran sesuai dengan ketentuan nasional di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan standard tenaga kerja internasional.

Menegakkan kebijakan yang membantu mencegah praktek yang mengandung unsur penyalahgunaan seperti pembayaran hutang yang melebihi kebiasaan kepada agen pengerahan tenaga kerja, tenaga kerja paksa, dan pembatasan yang dipaksakan, dengan cara:

- Menegakkan secara serius Undang-Undang Agen Pengerahan Tenaga Kerja untuk memastikan pemenuhan terhadap tuntutan biaya agen.
- Menerapkan berbagai kebijakan sehingga para pekerja domestik migran tidak menghabiskan berbulan-bulan kerja untuk melunasi hutang mereka dengan upah yang kecil atau tidak sama sekali, suatu situasi yang membantu berkembangnya praktik pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah seharusnya mencontoh Filipina dan Hong Kong, yang mewajibkan majikan untuk membayar biaya perjalanan udara pulang pergi dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan rekrutmen dan penempatan, mencakup biaya-biaya yang sekarang dipenuhi oleh pinjaman pribadi di Singapura. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan menyesuaikan retribusi bulanan untuk menyeimbangkan beban bagi majikan.
- Menghapus uang jaminan sebesar S\$5,000 [U.S.\$2,950].
- Membawa majikan yang mengurung (membatasi) pekerja domestik di tempat kerja ke pengadilan.
- Mengizinkan pekerja domestik migran untuk tinggal di ruang tempat tinggal mandiri.

Menciptakan dan meningkatkan mekanisme untuk mencegah, memonitor, dan merespon penyalahgunaan pekerja domestik migran dengan cara:

- Memeriksa kondisi-kondisi tempat kerja dan agen-agen pengerah tenaga kerja secara teratur.
- Menarik kuasa akreditasi dari Asosiasi Agen-agen Pengerah Tenaga Kerja di Singapura (*Association of Employment Agencies in Singapore/AEAS*) dan CaseTrust serta menciptakan suatu badan akreditasi baru untuk agen-agen pengerah tenaga kerja dengan standard yang lebih menyeluruh. Badan tersebut seharusnya meliputi wakil dari agen pengerah tenaga kerja, organisasi pelindung hak-hak konsumen, organisasi pelindung hak-hak pekerja domestik, Kementerian Tenaga Kerja, dan negara-negara pengirim tenaga kerja.

- Menciptakan unit-unit bantuan (*helpdesks*) di pelabuhan udara dan pos polisi utama dengan staf yang lancar berbicara dalam bahasa yang digunakan oleh pekerja migran. Meningkatkan pelatihan untuk polisi dan petugas imigrasi untuk merespon penyalahgunaan terhadap pekerja domestik migran.
- Melakukan "wawancara jalan keluar" (*exit interviews*) dengan pekerja domestik ketika mereka sedang pulang ke negara asal untuk memastikan bahwa mereka telah dibayar dan untuk menyediakan kesempatan untuk melaporkan penyalahgunaan dalam bentuk apapun.

Menandatangani dan mensahkan Konvensi tentang Perlindungan Hak Asasi Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Pekerja Migran).

Pemerintah Indonesia, Filipina, Sri Lanka, India, dan negara-negara pengirim tenaga kerja lain seharusnya:

Meningkatkan perlindungan bagi semua warganegara yang bekerja di Singapura dengan cara:

- Meningkatkan pelayanan terhadap korban di kedutaan-kedutaan dan misi-misi diplomatik di Singapura dan menyediakan sumber-sumber daya (*resources*) yang meliputi susunan kepegawaian yang cukup, akses ke bantuan hukum, pelayanan kesehatan, konseling trauma, dan rumah singga (*shelter*).
- Tetap membuka satu seksi kedutaan dan misi diplomatik pada Hari Minggu, hari di mana banyak pekerja migran menikmati liburan, dan mendukung program peningkatan keterampilan serta pusat-pusat rekreasi dan budaya untuk pekerja domestik.

Mengatur dan memonitor para agen rekrutmen tenaga kerja dan pusat-pusat pelatihan pekerja migran di negara-negara mereka dengan cara:

- Mengatur para agen tenaga kerja dan pusat pelatihan pekerja migran, dan melukiskan dengan lebih jelas standard untuk pembayaran, kondisi-kondisi keselamatan dan kesehatan minimum, serta kebebasan bergerak pekerja. Para agen tenaga kerja dan pelaku yang melanggar turan ini harus menghadapi hukuman substansial.
- Menetapkan mekanisme untuk pengawasan yang mandiri dan reguler terhadap agen-agen tenaga kerja, termasuk pemeriksaan tanpa pemberitahuan sebelumnya (*unannounced inspections*).

Badan Akreditasi dan Agen Pengerahan Tenaga Kerja harus:

Berperan dalam penciptaan kondisi kerja yang aman dan adil bagi pekerja domestik migran dengan cara:

- Menerapkan suatu kontrak ketenagakerjaan standard yang menetapkan perlindungan terperinci pada upah, jam kerja, libur mingguan, pengurangan gaji, dan prasyarat-

prasyarat lain dari ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan nasional dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan standard tenaga kerja internasional.

- Menciptakan taraf gaji yang direkomendasikan sesuai dengan pengalaman kerja dan kualifikasi lain, seperti pendidikan. Hapuslah kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif yang menentukan gaji tingkat awal menurut kebangsaan dan bukan menurut pengalaman kerja, pendidikan, atau kriteria yang relevan lainnya.
- Melaporkan kasus-kasus pelanggaran oleh majikan kepada Kementerian Tenaga Kerja, polisi, kedutaan, dan badan-badan akreditasi. Sebelum menempatkan pekerja domestik pengganti pada majikan yang tertuduh melakukan penyalahgunaan, para agen harus teliti sebagaimana yang seharusnya.